

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian menjadi sebuah potensi besar bagi negara Indonesia dalam menyokong pertumbuhan dan pembangunan. Menurut Kementerian Pertanian pada pandemi covid-19, Kuartal IV 2020 sektor pertanian tumbuh sebanyak 2,59 persen, tanaman pangan salah satunya padi menjadi pendukung sebesar 10,47 persen (Tempo.co, 2021). Peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan tanaman pangan adalah sub sektor dari sektor pertanian. Produk yang paling menonjol di Indonesia yaitu beras. Berdasarkan badan pusat statistik pada tahun 2022 peringkat tiga teratas produksi beras Nasional.

Tabel 1. 1 Jumlah Produksi Padi Kering Giling Indonesia Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah Produksi Padi Nasional (Ton)
1	Jawa Timur	9.526 516,00 Ton
2	Jawa Barat	9.433 723,00 Ton
3	Jawa Tengah	9.356 445,00 Ton

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Timur menjadi peringkat pertama produksi padi kering giling sebanyak 9,68 juta ton. Provinsi Jawa Barat menduduki posisi kedua sebagai produksi padi kering giling sebanyak 9,62 juta ton. Peringkat ketiga di duduki oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai produksi padi kering giling sebanyak 9,5 juta ton. Data tersebut dihitung BPS dengan luas panen dan produksi padi tahun 2022 dari bulan Oktober-Desember.

Kabupaten Majalengka berada pada peringkat kelima dalam memproduksi beras di Provinsi Jawa Barat. Berikut tabel peringkat produksi beras di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 menurut BPS Kabupaten Majalengka.

Tabel 1. 2 Jumlah Produksi Beras di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota (Ton)
1	Indramayu	1.482 255,86
2	Karawang	1.226 880,08
3	Subang	1.038 780,58
4	Cianjur	617,941,03
5	Majalengka	566,087,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Pertanian menjadi sektor yang krusial bagi masyarakat Indonesia. Populasi masyarakat Indonesia yang banyak menjadi salah satu faktor sektor pertanian harus dijaga stabilitasnya untuk tercukupinya kebutuhan pangan rakyat. Sektor pertanian telah menopang perekonomian sesuai data BPS.

Besarnya produksi padi pada setiap daerah, tentunya menjadi keuntungan bagi pemerintah dan perlu dijaga stabilitas produksinya. Pupuk termasuk barang yang strategis karena kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan produksi para petani. Kontribusi sektor pertanian juga untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pupuk, harga dan benih merupakan permasalahan utama dari kesejahteraan petani (Dahiri, 2018). Salah satu penyokong produksi padi adalah pupuk. Keberadaan pupuk sangat dibutuhkan untuk menghasilkan padi yang berkualitas. Pupuk juga merupakan barang strategis sehingga perlu diawasi dan

diatur peredarannya oleh pemerintah. Menjaga distribusi dan pengadaannya merupakan tugas pemerintah agar pupuk dapat diterima oleh petani sesuai dengan azas enam tepat meliputi tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.15/MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, maksud azas 6 (enam) tepat itu adalah:

- 1) Tepat Tempat : tempat dimana pupuk itu diberi
- 2) Tepat Jenis : jenis pupuk yang diberikan sesuai kebutuhan petani
- 3) Tepat Harga : harga sesuai HET atau tidak untuk petani
- 4) Tepat Mutu : pupuk yang diberikan sesuai atau tidak untuk petani
- 5) Tepat Jumlah : jumlah pupuk sesuai atau tidak dengan kebutuhan dan luas lahan petani (lahan dibawah 2 hektar)
- 6) Tepat Waktu : waktu pemberian pupuk sesuai kebutuhan petani 1 (satu) bulan sebelum musim panen.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuat kebijakan tentang penyaluran pupuk subsidi untuk memenuhi keenam azas diatas yaitu dengan pemberian pupuk subsidi. pupuk subsidi ini digunakan untuk menekan harga hasil dari pertanian agar lebih turun daripada tanpa menggunakan subsidi. Subsidi pupuk ini berupaya membantu petani kecil melalui kebijakan pupuk subsidi sesuai azas enam tepat. (Susila 2009). Kebijakan pupuk subsidi membuat harga asli dari harga

pupuk menjadi lebih rendah sehingga menstimulan para petani memakai dosis sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi.

Program kartu tani dirilis pada tahun 2017 dibawah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, tetapi kartu tani baru berjalan efektif pada Januari 2021 oleh Menteri Pertanian Yasin Limpo. Jumlah Petani di Kabupaten Majalengka yang menggunakan pupuk berjumlah 130.106 menurut data Sensus Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian Tahun 2023 Kabupaten Majalengka sedangkan menurut Iman Firmansyah selaku kepala DKP3 Kabupaten Majalengka menyebutkan terdapat 160.000 orang yang menggunakan kartu tani pada tahun 2023.



Gambar 1. 1 Gambar Bentuk Kartu Tani

Sumber: Times Jabar

Berdasarkan Website resmi Kementerian Pertanian kartu tani adalah fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai akses layanan perbankan, dapat berfungsi sebagai simpanan, kartu subsidi, dan penyaluran pinjaman. Kartu tani memiliki

beberapa keunggulan seperti validasi dan verifikasi data secara online, multifungsi dan *single entry data*.

Kemudian keuntungan kartu tani bagi petani yaitu:

1. Jaminan akan ketersediaan pupuk subsidi maupun non subsidi;
2. Hasil panen dijual secara langsung tanpa perantara;
3. Kemudahan dalam akses kredit usaha rakyat(KUR);
4. Menumbuhkan keinginan untuk menabung;
5. Ringan pada biaya simpanan;
6. Kemudahan dalam mendapatkan program Proyek Operasi Nasional Agraria;
7. Mendapatkan subsidi dengan mudah;
8. Mudah dalam mendapatkan bantuan sosial (Bansos).

(Rukmi Herta Ekoprapti.2019.Pertanian.go.id)

Pupuk subsidi masih memiliki problematika yang serius. Pupuk subsidi yang memiliki harga dibawah pasar. Membuat petani berbondong-bondong membeli pupuk subsidi melebihi kebutuhan yang di rekomendasikan oleh pemerintah. Keserakahan oknum petani tersebut yang membuat kelangkaan keberadaan pupuk subsidi di kios/pengecer. Pembelian pupuk subsidi yang melebihi batas maksimum yang dianjurkan pemerintah. Membuat distribusi pupuk subsidi tidak tepat sasaran. Pupuk subsidi masih memiliki masalah yang problematis terkait mekanisme

pendistribusiannya sehingga tidak sesuai dengan enam azas tepat. Pemerintah tidak diam begitu saja setelah melihat masalah tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan untuk mengatasi kerugian petani akibat pendistribusian pupuk subsidi yang tidak merata.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuat kebijakan program kartu tani. Kartu tani ini merupakan produk kebijakan pemerintah sebagai wujud kepedulian terhadap petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi.

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi dasar terbentuknya kartu tani. Pada Ayat 2 pasal 19 UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani “(2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi”.

Salah satu poin dalam ayat tersebut yakni pupuk, artinya pupuk sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana produksi pertanian. Peredarannya diatur oleh pemerintah. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Polemik kartu tani tidak hanya mengenai implementasi, banyak faktor yang mempengaruhi problematika di dalamnya. Ada indikasi intervensi dari faktor

politik seperti politisasi kebijakan hingga praktik korupsi, suap, monopoli dan adanya mafia pupuk. Indikasi masalah tersebut dapat membuat pelaksanaan kebijakan kartu tani menjadi terhambat dan sulit untuk berjalan optimal. Peneliti ingin melihat implementasi kartu tani di masyarakat khususnya petani dalam distribusi penebusan pupuk subsidi.

Politisasi kebijakan yang menimbulkan praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran regulasi pasti berasal dari pribadi atau kelompok yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri atau kelompok. Kepentingan pribadi dan kelompok ini timbul karena adanya *interest profit* yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang, keinginan untuk memperkaya diri tanpa memikirkan kesejahteraan Masyarakat secara luas.

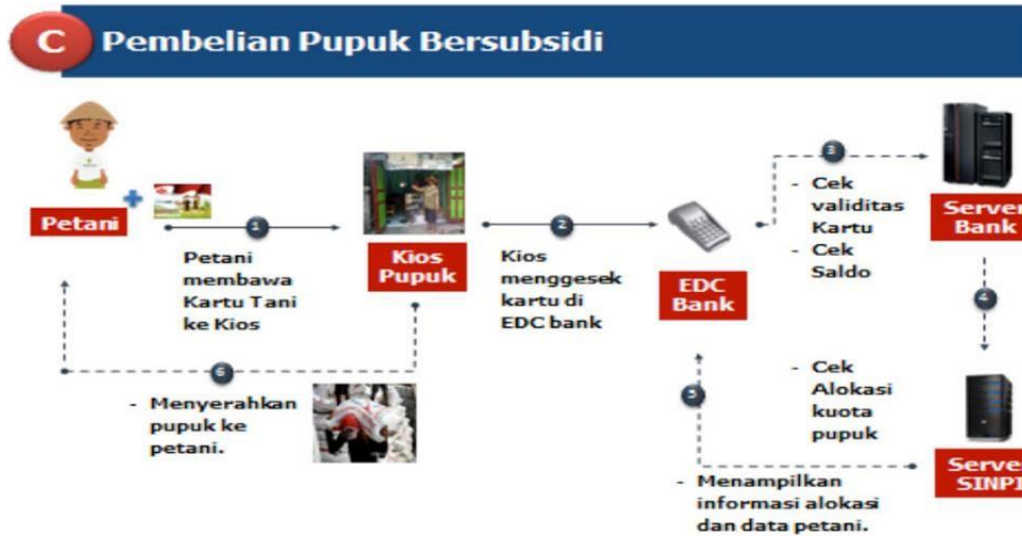
Salah satu contoh kasus mafia pupuk subsidi yaitu yang terjadi di Kebumen dilansir oleh detik jateng tanggal 08 Oktober 2023. Kejadiannya berada pada Kecamatan Prembun, Mirit dan Bonorowo sepanjang 2021-2022. Distributor melakukan Tindakan korupsi melalui CV perusahaannya. Tersangka melakukan penjualan ilegal diluar zona wilayah penjualan yang ditetapkan yaitu Kecamatan Prembun, Mirit dan Bonorowo sehingga mengakibatkan kelangkaan pupuk di sekedar wilayah tersebut. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa adanya sindikat mafia yang memiliki kepentingan untuk keuntungan pribadi semata. Tersangka tidak hanya berkerja sendiri pasti melakukan beberapa kolaborasi dengan instansi ataupun masyarakat yang bertujuan buruk karena kejahatan korupsi tersebut tidak akan semudah itu dilakukan jika *monitoring* dan evaluasi berjalan dengan baik. (Heksantoro, 2023)

Atas beberapa informasi dari redaksi berita diatas, dapat menjadi data pendukung yang valid bahwa praktik politik kebijakan benar terjadi adanya. Selain itu dari referensi jurnal dan skripsi yang peneliti cari, belum menemukan tentang masalah kebijakan program kartu tani yang menjelaskan dari sudut pandang faktor politik.

Program kartu tani memiliki manfaat yang cukup banyak, namun pada implementasi kebijakan program kartu tani ini masih memiliki hambatan-hambatan dalam implementasinya. Hambatannya seperti pada mekanisme pembelian pupuk subsidi yang cukup panjang.

Prosedur pembelian yang cukup rumit. Membuat petani sulit untuk mendapat pupuk subsidi dan di Kabupaten Majalengka secara infrastruktur masih kurang dalam memfasilitasi program kartu tani.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka Iman Firmansyah memberikan pendapat, perangkat yang digunakan untuk melakukan proses transaksi pembelian pupuk subsidi belum dapat digunakan secara menyeluruh di Kabupaten Majalengka. Masih banyak kesalahan pada *Electronic Data Capture* (EDC) sehingga penyaluran pupuk subsidi masih dilakukan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). (Cirebon, 2020)



Gambar 1. 2 Gambar Prosedur Pembelian Pupuk Bersubsidi

Sumber: Website DKP3 Kabupaten Majalengka

Kartu tani terlihat begitu simpel dan terdapat bank konvensional di dalamnya untuk memudahkan transaksi para petani. Selain itu terjadi *error* pada kartu tani yang sudah dimiliki oleh petani seperti saat cek kuota elektronik ternyata pupuk tidak tersedia dan pemilik kartu saat mengecek namun pemilik kartu tidak tersedia. Kasus lainnya seperti kuota petani dalam membeli pupuk subsidi habis sehingga tidak dapat membeli kembali pupuk subsidi. Pernyataan tersebut didukung dan sejalan dengan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan *Volume 28, No. 2, 2020* oleh Endro Gunawan, Sahat Pasaribu yang menyatakan berdasarkan hasil observasi di lapangan, untuk mendapatkan pupuk subsidi masih dilakukan secara manual karena masih banyaknya kartu tani yang tidak aktif, gangguan sinyal di beberapa daerah serta mesin EDC yang belum dapat membaca alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan petani. Selain itu menurut petani, penggunaan kartu tani itu lebih rumit.

Hambatan utama dari pelaksanaan program kartu tani yaitu sulitnya dalam penggunaan kartu tani, mekanisme penebusan pupuk bervariasi di setiap daerah. Kabupaten Temanggung mekanisme pembelian pupuk subsidi yaitu petani harus datang ke kios pengecer dengan membayar secara tunai untuk melihat saldo pupuk yang tersedia di kartu tani. Sedangkan di Bali prosesnya dengan mengantarkan langsung pupuk kepada kelompok tani (Gunawan dan Sahat Pasaribu, 2020). Hambatan lainnya yaitu kurangnya sosialisasi tentang program kartu tani sehingga petani tidak mengerti dalam mengaplikasikan kartu tani.

Masalah lainnya terdapat pada kondisi sosial budaya seperti jarak antara tempat tinggal petani dan bank. Survei di Kabupaten Temanggung terdapat fakta bahwa beberapa petani dengan sengaja memberikan nomor PIN kartu tani miliknya kepada kios pengecer agar lebih cepat dan malas menghafal nomor PIN, Sosialisasi dan edukasi mengenai sistem perbankan perlu di berdayakan lagi agar petani lebih berhati-hati dan *bankable*. (Gunawan dan Sahat Pasaribu, 2020). Hambatan-hambatan tersebut perlu dianalisis sebagai upaya evaluasi perbaikan program kartu tani. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai hambatan program kartu tani penyaluran pupuk subsidi dalam teori *interest group* di kabupaten majalengka.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Interest Group* berperan dalam pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana hambatan yang dialami oleh kelompok kepentingan dalam pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Majalengka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, Bagaimana Interest Group berperan dalam pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Majalengka? Dan bagaimana hambatan yang dialami oleh kelompok kepentingan dalam pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Majalengka?, Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Program Kartu Tani: Analisis Hambatan Dari Perspektif Interest Group Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan, diharapkan mampu berkontribusi secara positif bagi perkembangan keilmuan, wawasan, dan wacana pembaca mengenai hambatan program kartu tani studi kasus dalam teori *interest group* di kabupaten Majalengka untuk mengevaluasi pelaksanaan program kartu tani oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Tak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi beban referensi atau rujukan dalam penelitian lain dengan topik yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengetahui realita Hambatan Program Kartu Tani tinjauan dari teori *Interest Group* di Kabupaten Majalengka. Nantinya, hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi serta evaluasi bagi program kartu tani di Kabupaten Majalengka untuk bisa lebih optimal.

1.5 Tinjauan Pustaka

Bagian pertama dari tinjauan pustaka ini adalah perspektif empiris melalui pemaparan beberapa kajian apa yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Bagian kedua selanjutnya adalah perspektif teori yang menguraikan beberapa teori dan konsep dalam kajian ilmu Pemerintahan dengan menggunakan perspektif, model dan paradigma yang berbeda.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, Kasiami Sri (2020), Melakukan penelitian dengan judul Hambatan-Hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hambatan penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Total informan berjumlah 72 orang. Pada penelitian ini mengarah kepada informasi, dukungan, isi kebijakan, dan pembagian potensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Kartu tani menjadi program pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. kartu tani digunakan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas distribusi pupuk subsidi. Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang menerima program kartu tani pertama kali pada tahun 2017. 28 Kecamatan di Bojonegoro sudah dibagikan 172.266 kartu tani oleh pemerintah. Meski demikian dalam implementasinya menurut penelitian ini petani belum bisa mengakses kemudahan dan manfaat dari kartu tani. Hal tersebut terjadi karena kartu tani tidak bisa digunakan untuk menebus sepenuhnya pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data dari dinas pertanian mendapatkan tiga kecamatan yang memberi kartu tani melebihi data e-RDKK diantaranya yaitu kecamatan Katilidu, Tambakrejo, dan Kanor. Peristiwa tersebut dapat memperlambat implementasi pendistribusian pupuk subsidi sesuai e-RDKK. Hambatan lainnya berada pada stakeholder yaitu penyuluh pertanian lapangan (THL) yang memiliki tugas untuk mewadahi serta memfasilitasi petani seperti mendata penerima Kartu Tani. Selain itu mendata luas lahan milik petani serta menentukan alokasi pupuk yang akan di dapatkan oleh petani. Tugas tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar, apalagi menentukan alokasi pupuk bagi petani harus diperbaharui setiap perubahan musim. Kekurangan tenaga lepas harian sehingga terjadi fenomena satu THL membawahi empat desa yang terdiri dari tiga ribu petani. akan sangat sulit bagi THL untuk bekerja cepat dan efektif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu isi kebijakan masih menjadi hambatan utama. Isi kebijakan ini meliputi beberapa poin, pertama tentang isi kebijakan yang samar, ketetapan internal dan eksternal dari kebijakan kartu tani, kekurangan yang krusial dan kekurangan yang melibatkan sumber daya pembantu.

Pertama masalah samarnya isi kebijakan, kebijakan program kartu tani sudah terperinci, hanya pada penerepananya seperti sarana dan prasana yaitu kartu tani belum terdistribusi secara menyeluruh dan alokasi pupuk subsidi yang sangat kurang jika merujuk kepada jumlah alokasi pupuk bersubsidi di e-RDKK. Meskipun kartu tani sudah terdistribusi secara

menyeluruh, masih tetap akan bermasalah karena alokasi pupuk yang belum sesuai dengan jumlah alokasi di e-RDCK petani.

Kedua, Tidak ada peraturan mengikat dari pihak dalam maupun pihak luar pada kebijakan yang dilaksanakan . Pihak eksternal Kurangnya prosedur pelaksanaan dari pusat pemerintah. Kemudian pihak internal pemerintah daerah tidak ada standar operasional yang diatur khusus untuk mendukung program kartu tani.

Ketiga, pada penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penelitinya. Minimunnya alokasi pupuk bersubsidi setelah terdistribusinya kartu tani. Pemegang kartu tani menganggap bahwa lebih ribet menggunakan kartu tani. Contohnya seperti bagi para penggarap/petani yang memiliki lahan garapan di beberapa tempat yang berbeda, pupuk dapat ditebus hanya pada satu kios saja, tidak bisa mendapat kartu tani apabila NIK petani tidak valid dan pergantian penggarap bagi lahan sewa sulit diproses.

Keempat, kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber dayasumber daya pembantu. Kurangnya tenaga harian lepas yang bertugas dilapangan. Pengerjaan yang semakin lama akibat dari kurangnya sumber daya manusia. Selain itu beban kerja yang tidak sesuai dengan insentif yang diberikan. Tidak ada biaya tunjangan atau *reward* apapun. Hanya ada tunjangan dari pemerintah pusat. Itu membuat kinerja tenaga harian lepas semakin menurun. Hambatan-hambatan program kartu tani pada jurnal diatas menjadi bukti dan juga acuan bagi peneliti bahwa banyak faktor yang

menghambat pelaksanaan program kartu tani. Distribusi kartu yang kurang merata, sinkronasi data yang kurang baik, dan kurangnya sumber daya manusia menjadi bukti perlu adanya evaluasi dari kebijakan kartu tani.

Kedua, Fahmi, Maria, (2020) , melakukan penelitian tentang menganalisis dari faktor luas lahan, lingkungan bertani, pengalaman bertani, pendidikan, usia, dan kedudukan kelompok tani terkait persepsi petani dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini dilaksanakan kepada beberapa kelompok tani yaitu Dusun Daleman, Bungas, Ngablak dan Woinolelo, Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Meneliti kepada 70 responden. Beberapa variabel yang disebutkan diatas hopefully dapat menjadi tolak ukur persepsi petani terhadap implementasi program kartu tani di Desa Kadirejo.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa ada beberapa variabel yang signifikan mempengaruhi terhadap implementasi kartu tani. Pengaruh usia dan pengalaman bertani menjadi hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan kartu tani karena kebanyakan petani lebih terbiasa dengan cara *cash on carry*, melihat umur mereka yang diatas 50 tahun dan rata-rata pengalaman bertaninya sudah 33-40 tahun. Problematika tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya penyuluh pertanian dalam mensosialisasikan kartu tani agar *mindset* petani dapat berubah. Selanjutnya variabel pendidikan dan luas lahan memberikan hasil kearah positif terhadap persepsi implementasi kartu tani karena pendidikan akhir para petani rata-rata yaitu SD atau MI sehingga butuh penggalakan petani milenial

Indonesia untuk mendorong penggunaan kartu tani. Luas lahan yang dimiliki pada keempat daerah tersebut antara 0,26-0,50 Ha, semakin besar lahan yang dimiliki maka kebutuhan pupuk subsidi pun harus lebih banyak.

Pada kartu tani sudah teralokasikan jumlah kebutuhan pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan petani. Variabel lainnya seperti lingkungan dan kedudukan petani di dalam kelompok tidak memiliki keterkaitan yang signifikan karena pengecer pupuk memberikan akses kepada petani seperti membawa mesin EDC dan mengantarkan pupuk subsidi ke daerah petani jika diperlukan. Relevansi pada penelitian ini yaitu ada korelasi antar variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kartu tani. Usia petani diatas 50 tahun serta pengalaman Bertani sekitar 33-40 tahun dapat menjadi hambatan keberhasilan kartu tani karena sudah terbiasa dengan cara dulu yang membawa uang kepada pengecer secara langsung. Butuh usaha lebih dalam mengubah pola pikir petani yang sudah memiliki usia diatas 50 untuk menggunakan teknologi kartu tani yang berbasis digital, seperti penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut.

Ketiga, Putri Rosalina Sutikno, dkk, (2022) Melakukan penelitian tentang efektivitas program kartu tani di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Populasi penelitian tersebut adalah petani di Kecamatan Proppo yang menggunakan kartu tani berjumlah 110 responden. Menggunakan metode kuantitatif dengan menghitung efektivitas program kartu tani dengan angka menggunakan skala likert dan di jelaskan secara narasi.

Penelitian tersebut mendapatkan hasil yang cukup baik dalam pelaksanaan program kartu tani. Ada beberapa pertanyaan kuisisioner yang di tanyakan pada penelitian ini yaitu nilai responden berdasarkan kriteria usia responden, berdasarkan pengalaman bertani responden, distribusi skor dari hasil penelitian mengenai efektivitas program kartu tani di Kecamatan Proppo. Selanjutnya ada empat aspek pengukuran efektivitas program pada penelitian tersebut. Aspek pertama yaitu keberhasilan sasaran, kedua pencapaian tujuan, ketiga tersedianya sarana dan prasarana, keempat adalah sistem pengawasan dan pengendalian.

Pada aspek pertama dan keempat yaitu keberhasilan sasaran dan sistem pengawasan dan pengendalian mendapatkan hasil tingkat efektivitas yang sudah efektif sedangkan aspek kedua dan ketiga yaitu pencapaian tujuan dan tersedianya sarana dan prasarana mendapatkan hasil tingkat efektivitas yang cukup efektif. Selain itu adapula hambatan dalam penerapan program kartu tani di Kecamatan Proppo, yang menyebabkan efektivitas program kartu tani tersebut menjadi hanya cukup efektif. Pertama, penggunaan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk subsidi yang belum terlaksana dengan baik. Petani yang hendak menebus pupuk subsidi di kios-kios pengecer resmi masih menggunakan fotokopi KTP, seharusnya sudah menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Kedua yaitu terbatasnya kios resmi untuk membeli pupuk subsidi. Kurangnya sarana dan prasarana seperti kios resmi pupuk subsidi yang kurang, beberapa kelompok tani memberikan opsi adanya tambahan biaya transportasi untuk penebusan

pupuk sebagai jalan alternatif. Kios yang tersedia hanya ada enam kios saja, sedangkan setiap kios harus mengurus 4-5 desa sekaligus, sehingga melebihi kapasitas pupuk di kios resmi.

Beberapa hambatan yang di hasilkan dari penelitian tersebut, dapat menjadi acuan juga terhadap penelitian ini. Peneliti mendapatkan tolak ukur serta mengkomparasi masalah antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perlunya penelitian terdahulu ini agar dapat melihat apakah keresahan serta hambatan yang ada di dalam penelitian terdahulu terjadi juga pada penelitian yang akan dilakukan saat ini. Hasil penelitian berupa efektivitas yang cukup baik di Kecamatan Proppo dapat menjadi pembanding apabila hasil dari penelitian ini sudah keluar.

Keempat, Penelitian selanjutnya dalam Gunawan Endro, Sahat Pasaribu, (2020), Penelitian tersebut untuk mendapatkan persepsi petani dalam implementasi program kartu tani untuk mendukung distribusi pupuk bersubsidi. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif kepada 9 Kabupaten/kota dari 4 provinsi yang sudah melaksanakan program kartu tani yaitu: Provinsi Yogyakarta , Jawa Tengah, Jawa barat , dan Bali. Lokasi diambil berdasarkan dua kriteria target dan realisasi program. Hasil analisis *Weighted Average Index* yang merupakan mengukur bobot dari setiap persepsi responden, bahwa permasalahan program kartu tani itu adalah: Kesulitan penggunaan kartu tani, pemakaian kartu yang belum diwajibkan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, petani yang belum *bankable*, tambahan biaya angkut dan masalah pada mesin *Electronic Data Capture*.

Lambatnya pelaksanaan program kartu tani pada jurnal tersebut karena Dinas Pertanian tidak membuat Langkah teknis lapangan untuk implementasi kartu tani. Kemudian ada beberapa saran yang diberikan oleh jurnal tersebut yaitu: Perlu adanya sinkronasi paham dan pandangan tentang kebijakan tersebut agar regulasi dapat berjalan secara optimal di setiap level kabupaten maupun petani, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antar instansi pemerintah seperti Dinas Petanian, Disdukcapil dan bank, agar sinkronasi data pada pengalokasian pupuk subsidi tepat sasaran dan validasi data pengguna kartu tani sesuai dengan data di lapangan,

Dinas Pertanian seharusnya memiliki cara yang lebih kreatif untuk mendorong serta mempercepat pelaksanaan program kartu tani terlebih Dinas Pertanian sebagai penanggung jawab program kartu tani, seperti pengadaan sarana dan prasarana, informasi teknologi dan sumber daya manusia, selanjutnya diperlukan Integrasi pelaksanaan sosialiasi dan promosi program kartu tani agar pelaksanaannya optimal dan terkendali sehingga petani dan pengecer paham betul informasi tentang kartu tani secara menyeluruh, Infrastruktur seperti ketersediaan internet untuk menjalankan aplikasi kartu tani, jaminan pupuk bersubsidi selalu tersedia pada kios resmi, dan perlunya mekanisme administrasi yang tidak ribet.

Penelitian terdahulu diatas memiliki problematika yang berbedabeda. Setiap masalah memiliki hambatan yang berbeda karena berdasarkan seperti daerah yang diteliti, metode penelitian, objek penelitian dan waktu

penelitian menentukan bagaimana pelaksanaan kartu tani apakah berjalan baik atau tidak. Penelitian diatas menjadi tolak ukur serta komparasi untuk peneliti meneliti masalah di daerahnya sendiri, penelitian terdahulu diatas juga dapat menjadi validasi bahwa urgensi penelitian ini itu penting untuk diteliti. Adanya problematika dan hambatan pada setiap penelitian menjadi dorongan peneliti untuk menganalisis dan memberikan saran terkait masalah yang sedang terjadi agar keberjalanan kebijakan tersebut lebih baik secara berkelanjutan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori *Interest Group*

Truman menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok kepentingan mempengaruhi proses politik dan pembuatan kebijakan dalam suatu negara. Truman berargumen bahwa kelompok kepentingan adalah elemen penting dalam sistem politik demokratis karena mereka menyediakan cara bagi individu untuk menyuarakan kepentingan mereka secara kolektif dan berinteraksi dengan pemerintah.

Penerapan teori kelompok kepentingan menurut Truman, D. B. (1951) dalam buku "*The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion*". dalam konteks kebijakan kartu tani dapat melibatkan empat konsep utama:

1. Mobilisasi Kelompok Kepentingan: Penting untuk melihat bagaimana kelompok-kelompok kepentingan, seperti petani, kooperatif pertanian, atau organisasi petani, memobilisasi anggotanya dan pihak pemerintah dalam memobilisasi kelompok kepentingan agar menggunakan kebijakan. Ini termasuk bagaimana mereka menggerakkan dukungan untuk atau melawan kebijakan, serta kemampuan mereka untuk memobilisasi sumber daya, seperti pengaruh politik, jaringan, atau dukungan masyarakat.
2. Artikulasi Kepentingan: Konsep ini mengacu pada cara kelompok-kelompok kepentingan menyampaikan atau mengungkapkan kebutuhan, keinginan, atau masalah yang mereka hadapi terkait dengan kebijakan kartu tani. Bagaimana suara-suara ini diungkapkan, apakah itu melalui advokasi, demonstrasi, atau mekanisme lainnya, dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
3. Agenda Setting dan Pengaruh: Kelompok-kelompok kepentingan memiliki peran dalam menentukan prioritas dan agenda seputar kebijakan kartu tani. Bagaimana mereka mempengaruhi perdebatan publik dan pembuat kebijakan dapat memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Kemampuan mereka untuk mendapatkan dukungan atau mengalihkan perhatian dapat berdampak besar.
4. Negosiasi dan Kompromi: Dalam proses implementasi kebijakan kartu tani, akan ada situasi di mana kelompok-kelompok kepentingan perlu berunding atau mengkompromikan kepentingan mereka. Ini dapat terjadi dalam

negosiasi dengan pemerintah, institusi keuangan, atau kelompok lain untuk memastikan keberhasilan atau penyesuaian kebijakan.

Dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam penelitian tentang hambatan program kartu tani, Anda dapat memahami dinamika interaksi antara kelompok kepentingan yang berbeda dan peran mereka dalam membentuk dan mempengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasi kebijakan tersebut.

Kelompok kepentingan menurut Almond dan Powell (1980) dalam karyanya “*Comparative Politics Today: A World View* (1992)” (Budiardjo, 2007) yaitu kelompok kepentingan dibagi menjadi empat jenis utama:

Pertama, kelompok anomik adalah kelompok spontan dengan komunikasi politik rendah, keanggotaan yang longgar, dan muncul sebagai respons terhadap insiden tertentu. Mereka cenderung memasuki sistem politik untuk menanggapi isu tertentu yang bisa muncul dari ketidakpuasan, seringkali menghasilkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun, begitu aspirasi mereka didengar oleh pemerintah, kelompok ini biasanya bubar, seperti contohnya Ikatan Warga Desa Wadas, Warga terkena lumpur lapindo, dan sejenisnya.

Kedua, Kelompok nonassosiasional merupakan kelompok kepentingan yang terorganisir secara informal dengan keanggotaan longgar dan fokus pada isu-isu tertentu. Meskipun jaringannya terbatas, lebih terstruktur daripada kelompok anomik. Perbedaannya terletak pada

keanggotaannya yang seringkali memiliki latar belakang atau identitas yang serupa, seperti kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, atau kelas sosial. Contoh kelompok ini meliputi, Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak Se-Kalimantan, , Alumni ITB, Alumni Pendidikan Lemhannas, serta kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain-lain.

Ketiga, Kelompok institusional adalah kelompok kepentingan yang formal dan terstruktur dengan jaringan organisasi yang kuat serta keanggotaan resmi. Mereka memiliki peran sosial dan politik yang meliputi hampir semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, dan lingkungan. Contohnya termasuk Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan sebagainya.

Keempat, Kelompok asosiasi adalah kelompok dengan struktur organisasi formal yang terorganisir baik, dengan anggota resmi atau formal. Mereka terdiri dari individu yang berbagi profesi serupa dan memiliki tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya di bidang-bidang tertentu yang menjadi fokus mereka. Contohnya, seperti Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan sebagainya.

Keempat jenis kelompok kepentingan tadi memiliki tingkat kesuksesan yang berbeda beda dalam mempengaruhi pemerintah, kelompok institusional dan assosiasional memiliki keberhasilan lebih tinggi dibandingkan anomik dan nonassosiasional.

Keterkaitan kebijakan dan konsep kepentingan publik yaitu adanya hubungan yang erat antara kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut dibuat untuk apa. Kebijakan seharusnya dibuat untuk menghasilkan sebuah solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Masalah sosial dan mencakup khalayak umum harus diselesaikan dengan hukum kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik. Kepentingan publik ini menjadi salah satu faktor terbentuknya kebijakan publik.

Menurut Jurnal Ilmiah Demokrasi, Kelompok kepentingan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kepentingan privat dan kelompok kepentingan public. *Pertama* Kelompok kepentingan privat memposisikan dirinya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan atas dasar anggota atau golongannya masing-masing seperti: Guru, Dosen, Dokter, Akuntan, Pengusaha serta golongan lainnya termasuk buruh. *Kedua* Kelompok kepentingan publik, mereka memperjuangkan suara-suaranya untuk di audiensikan kepada pemerintah yang nantinya akan menjadi sebuah kebijakan bersifat publik atau umum. Contohnya seperti perlawananperlawanan terhadap isu lingkungan, ketenagakerjaan, Perempuan dan anak-anak, korupsi, kekerasan seksual, kesetaraan gender dan sebagainya.

1.6.2 Politik Kebijakan Dan Faktor-faktor Penghambat kebijakan

Negara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan politik, karena adanya negara disitulah politik dapat berkembang. Politik merupakan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan alokasi.

Menurut Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya *Introduction to Politics* mengatakan: "Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara . . . dan Lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara (*Political science is the study of the state, its aim and purposes ... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state*).” (Budiardjo.2008:17).

Politik notabene merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Keputusan untuk merencanakan kebijakan harus dengan menanamkan kepentingan rakyat diatas kepentingan kelompok dan pribadi. Kebijakan yang optimal dapat dilihat dari seberapa besar dampak yang diterima oleh Masyarakat. Pengambilan keputusannya perlu dianalisa apakah terdapat politisasi yang berujung pada hanya mementingkan Sebagian kelompok saja.

Kebijakan politik dapat dipahami sebagai salah satu jenis korupsi politik. Mengutip analisis korupsi politik yang dijelaskan oleh Adelina (2019), korupsi politik adalah ketika para pengambil keputusan politik menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kekuasaan, jabatan, atau kekayaannya.

Politik kebijakan berperan untuk melihat bagaimana kekuasaan merencanakan, memformulasikan serta mengevaluasi kebijakan. Regulasi

pemerintah muncul karena adanya kekuasaan, keputusan politik berdampak kepada bentuk peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah. Menurut para pakar, politik kebijakan adalah langkah-langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat. Ini mencakup beragam tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki dampak luas pada mayoritas penduduk.

Miriam Budiardjo memberikan kontribusi dalam mendefinisikan politik kebijakan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan serta pelaksanaan kebijakan. (Budiardjo, 2007)

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dilihat menggunakan konsep faktor-faktor penghambat suatu program kebijakan publik. Setiap regulasi perlu adanya tolak ukur untuk melihat kesulitan dalam pelaksanaannya. Berikut ini merupakan faktor penghambat yang dapat dijadikan acuan untuk menilai keberjalanan kebijakan kartu tani.

Menurut (Sunggoono Bambang.1994: 151), ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu:

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan yang gagal karena buruknya isi kebijakan, maknanya karena tujuan, penerapan prioritas, sarana kebijakan masih terlalu luas. *Kedua*, kurang adanya

ketetapan intern dan ekstren dari kebijakan yang dibuat. *Ketiga*, kebijakan yang diimplementasikan dapat memperlihatkan adanya kekurangan-kekurangan. *Keempat*, Kegagalan implementasi kebijakan ini dapat muncul karena kurangnya halhal menyangkut sumber daya pembantu seperti tenaga manusia, biaya, dan waktu.

b. Informasi

Informasi tentang implementasi kebijakan publik memberikan asumsi bahwa pemegang peran yang terlibat memiliki informasi yang sangat penting agar dapat memainkan perannya dengan baik, justru malah tidak ada, misalnya seperti gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Dukungan pelaksanaan kebijakan publik akan sulit apabila pada implementasinya kurang dukungan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Perlu dukungan dari *stakeholders* yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Dukungan ini melihat seberapa besar kontribusi dari pemangku kekuasaan dalam melaksanakan kebijakan.

d. Pembagian potensi

Pembagian potensi sangat berkaitan dengan kegagalan implementasi kebijakan pembagian potensi antar pelaku yang bersangkutan dalam melaksanakan. Kasus ini melibatkan

pembagian kekuasaan pelaksana, Menyiapkan struktur

organisasi dapat menimbulkan masalah jika distribusi tanggung jawab dan kekuasaan tidak disesuaikan dengan semestinya,

Pembatasan pembagian kerja atau pelabelan yang tidak jelas (Bambang Sunggono, 1994: 151) dalam (Agindawati isye Nuriyah. 2019).

Faktor-faktor hambatan diatas dapat dijadikan acuan dalam menganalisis hambatan program kartu tani di Majalengka. Bagaimana faktor-faktor tersebut mendeskripsikan setiap hambatan serta mengklasifikasikannya termasuk ke dalam hambatan besar atau kecil. Dengan adanya tolak ukur hambatan tersebut, mudah untuk melakukan interpretasi karena sudah ada parameter yang jelas.

1.6.3 Sektor Pertanian dan Perlindungan Petani dalam Kebijakan

Menurut konsep klasik dari Kuznet dalam Todaro (2002), Sektor pertanian memiliki peran yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian pada negara berkembang. Sektor pertanian memberikan sumbangan-sumbangan terhadap negara seperti produksi pangan, sumbangan berupa devisa, sumbangan tenaga kerja dan sumbangan pasar. (Ufira Isbah, 2016)

Pembangunan sektor pertanian memiliki arti luas yaitu untuk meningkatkan swasembada pangan, produksi petani, meningkatkan

pendapatan petani, membuka lapangan pekerjaan, pengadaan bahan baku dan industry, kebutuhan untuk di ekspor. (Simatupang, 2004 : 41) dalam (Ramlawati, 2020)..

Sektor pertanian menjadi poros pembangunan, kontribusinya untuk devisa negara, penyediaan pangan, bahan baku industri dan lain-lain. Sektor pertanian memiliki lima sub sektor yaitu perkebunan, peternakan, tanaman pangan dan perikanan (BPS).

Pemerintah membuat peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Pasal 1 ayat 1 berisi:

“ Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim”.

Dalam ayat tersebut berisi tentang poin-poin yang diberikan pemerintah dalam upaya melindungi petani seperti sarana dan prasarana, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Seluruh poin tadi dijamin oleh pemerintah untuk menjaga kesejahteraan petani.

Pemberdayaan petani juga menjadi urgensi penting bagi pemerintah dalam melestarikan dan menjaga kesejahteraan petani. Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 ayat 2 yaitu:

“ Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani”

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang pemberdayaan yang akan dilakukan pemerintah. Pemberdayaan secara berkelanjutan seperti penyuluhan, pelatihan, pengembangan sistem, akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi dijamin oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas petani. Itulah merupakan urgensi sektor pertanian dan bagaimana pemerintah melindungi hak-hak petani yang berpengaruh besar bagi negara.

Sesuai seperti menurut Sudaryanto dan erizal (2002:88) dalam Ramiawati (2020), pembangunan pertanian itu untuk menambah produksi untuk konsumen serta meningkatkan kualitas usaha tani seperti pendapatan dan produktivitasnya dengan memberikan modal dan *skill*. Penambahan pendapatan, produktivitas maupun *skill* tersebut akan berlangsung secara terus menerus apabila berhenti, artinya pembangunan terhenti. (Lidia Kamelia, 2022) Pernyataan diatas menjelaskan bahwa perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam konteks penulisan skripsi adalah proses mendefinisikan secara jelas dan sistematis bagaimana suatu konsep atau variabel dalam penelitian akan diukur atau dianalisis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsep atau variabel tersebut dapat diobservasi dan diukur dengan cara yang konsisten dan objektif dalam penelitian.

Penerapan teori kelompok kepentingan menurut David B Truman . (1951) dalam Buku "*The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion*". Alfred A. Knopf David B.

NNo	Indikator	Definisi	Keterangan
11.	Mobilisasi	Menganalisis pergerakan dari petani, pengecer kios, distributor dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Majalengka (DKP3) dalam mempengaruhi keberjalanan kartu tani	a) Melihat tingkat partisipasi dan dukungan kelompok pertanian Upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan daerah b) Bentuk pergerakan apa yang dilakukan oleh kepentingan kelompok dalam mempolitisasi kebijakan kartu tani

22.	Artikulasi	Menganalisis pada cara kelompokkelompok kepentingan menyampaikan atau mengungkapkan kebutuhan, keinginan, atau masalah yang mereka hadapi terkait dengan kebijakan kartu tani	<ul style="list-style-type: none"> a) Kecakapan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi pembuat kebijakan b) Bagaimana kelompok kepentingan menyampaikan keluhan dan masalahmasalah yang ada pada kartu tani.
33.	Agenda Setting	Menganalisis Kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki peran dalam menentukan prioritas dan agenda seputar kebijakan kartu tani. Bagaimana mereka mempengaruhi perdebatan publik dan pembuat kebijakan dapat memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> a) Rencana apa saja yang dibuat dari kelompok kepentingan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan b) Indikasi politisasi kelompok kepentingan terhadap kebijakan kartu tani

44.	Negosiasi dan Kompromi	Menganalisis dalam negosiasi dengan pemerintah, institusi keuangan, atau kelompok lain untuk memastikan keberhasilan atau penyesuaian kebijakan kartu tani	<ul style="list-style-type: none"> a) Komunikasi dan koordinasi antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan b) Bentuk negosiasi antar kelompok kepentingan c) Hasil Kompromi yang dibuat oleh antar kelompok kepentingan
			yaitu petani, Kios pengecer, distributor dan DKP3

Penerapan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan oleh (Sunggono Bambang.1994: 151), ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu:

NNo	Indikator	Definisi	Keterangan
-----	-----------	----------	------------

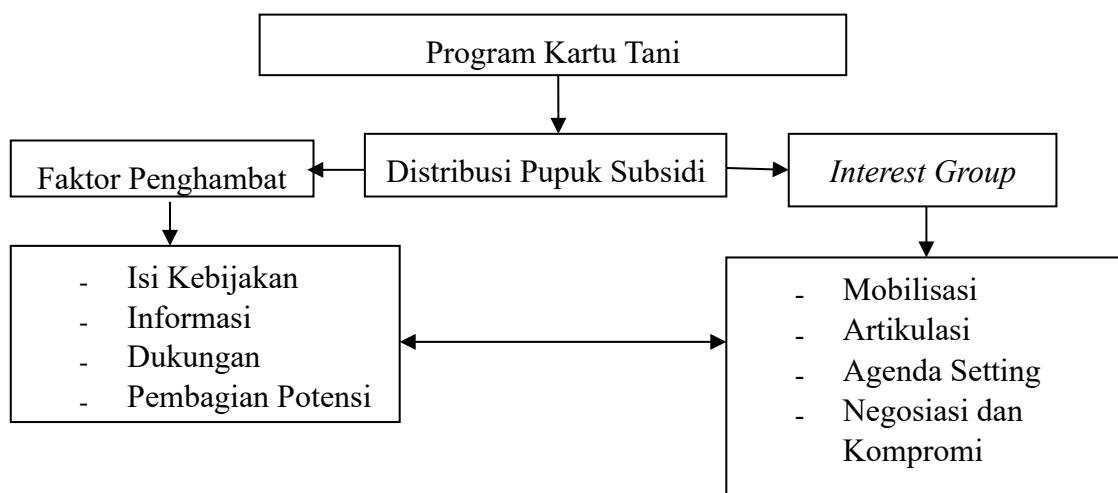
11.	Isi Kebijakan	Menganalisis seperti apa kebijakan tersebut di dalam peraturan pemerintah dari mulai perencanaan, aturan main, <i>punishment</i> , resiko sampai bentuk pelaksanaannya di lapangan.	<p>c) Melihat pemahaman para aktor kebijakan terhadap regulasi yang akan dilaksanakan.</p> <p>d) Bentuk kebijakan seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, apakah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau belum.</p>
-----	---------------	---	--

22.	Informasi	Menganalisis hambatan yang dirasakan oleh masyarakat terkait penyampaian informasi dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.	<p>c) Penyaluran informasi yang dilakukan setiap aktor untuk menyebarkan kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan optimal.</p> <p>d) Bentuk sosialisasi apa yang dilakukan oleh setiap <i>stakeholder</i> dalam memberikan informasi kepada penerima kebijakan.</p>
-----	-----------	---	---

33.	Dukungan	Menganalisis bagaimana pemerintah dan aktor lainnya mendukung program kebijakan dari pemerintah seperti dukungan berupa materil maupun non materil.	<p>c) Dukungan seperti apa yang diberikan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri untuk mendorong keberhasilan kebijakan.</p> <p>d) Apakah dukungan tersebut berjalan dengan baik atau malah terdapat masalah pada setiap pemangku kekuasaan.</p>
44.	Pembagian Potensi	Menganalisis menganalisis pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan kebijakan apakah	d) Wewenang setiap pelaksana kebijakan sudah dijalankan sesuai tupoksi
		terdapat tumpang tindih wewenang atau tidak.	e) Tumpang tindih kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan

1.8 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka berpikir adalah pola berpikir yang menjadi landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek. Ini merupakan alur berpikir yang dijadikan sebagai pola untuk menyusun penelitian yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut adalah kerangka berpikir peneliti:



1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian studi tentang kondisi alam di mana para ilmuwan adalah alat dan kunci. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan bantuan triangulasi (gabungan) dengan bantuan analisis data. bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menggarisbawahi pentingnya makna daripada generalisasi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin melalui Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi program kartu tani dari teori *interest group* studi kasus Kabupaten Majalengka.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang menjabarkan tentang kondisi atau keadaan dalam suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti hendak mengidentifikasi variabel-variabel yang berkaitan dengan Hambatan Program Kartu Tani: Tinjauan dari Teori *Interest Group* (Studi Kasus Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kabupaten Majalengka) yang kemudian peneliti menjabarkan secara deskriptif berbagai realitas sosial yang ditemukan.

1.9.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Penyuluh Pertanian Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasokandel Aditya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka Ir. Iman Firmansyah M.M dan Staff Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Majalengka (DKP3) Bidang Tanaman Pangan Saefulloh yang terkait langsung dengan kebijakan program kartu tani dan sebagai pelaksana dalam menyediakan akses pelayanan program kartu tani. Kemudian dari sisi masyarakat, penelitian ini mengambil subjek penelitian dari kelompok tani yang ada di Kabupaten Majalengka, Petani yang memiliki serta menggunakan kartu tani untuk mendapatkan pupuk subsidi Muhammad Ikhsan selaku Ketua Gapoktan Desa Ranjiwetan Kecamatan Kasokandel, selain itu dari sisi swasta yaitu pengelola kios Kecamatan Jatiwangi pengecer Nana yang menyediakan pupuk subsidi bagi petani.

1.9.3 Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti memakai sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian. Termasuk wawancara dengan instansi/instansi berwenang seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka terkait hambatan-hambatan dalam program kartu tani di Kabupaten Majalengka dan aktor-aktor kelompok kepentingan.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut (Sugiyono.2014:137), Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data seperti dokumen, buku atau melalui orang. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, literatur, media online dan jurnal yang berhubungan dengan hambatan program kartu tani

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua orang untuk menemukan atau menukar informasi dan ide melewati proses tanya jawab agar memberikan makna pada topik pembicaraan tertentu. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data serta informasi yang konkrit mengenai

Hambatan Program Kartu Tani: Tinjauan Dari Teori *Interest Group* (Studi Kasus Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kabupaten Majalengka) melalui tanya jawab langsung kepada subjek penelitian yang terdiri dari. Penyuluh Pertanian Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasokandel Aditya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka Ir. Iman Firmansyah M.M dan Staff Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Majalengka (DKP3) Bidang Tanaman Pangan Saefulloh yang terkait langsung dengan kebijakan program kartu tani dan sebagai pelaksana dalam menyediakan akses pelayanan program kartu tani. Kemudian dari sisi masyarakat, penelitian ini mengambil subjek penelitian dari kelompok tani yang ada di Kabupaten Majalengka, Petani yang memiliki serta menggunakan kartu tani untuk mendapatkan pupuk subsidi Muhammad Ikhsan selaku Ketua Gapoktan Desa Ranjiwetan Kecamatan Kasokandel, selain itu dari sisi swasta yaitu pengelola kios Kecamatan Jatiwangi pengecer Nana yang menyediakan pupuk subsidi bagi petani.

2. *Desk Study*

Desk Study adalah teknik pengumpulan data berdasarkan materi yang diterbitkan di perpustakaan umum, laporan dan dokumen serupa yang tersedia di situs web, data survei, data yang berasal dari organisasi atau Lembaga, dan lainnya. Riset yang dilakukan menggunakan *desk study* mengedepankan efisiensi dan efektivitas sehingga menghasilkan riset yang

berkualitas. Prinsip pendekatan penelitian *desk study* adalah hasil penelitian yang optimal.

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan terjun langsung kelapangan dengan melakukan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku subjek. Observasi digunakan untuk mengamati dan menganalisis secara langsung perilaku, proses kerja dan gejala yang terjadi. Pencacatan secara sistematis juga dilakukan selama penelitian ini berlangsung terutama berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

1.9.5 Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data yang nantinya menjadi informasi yang utuh sehingga penjabaran seperti sifat serta karakteristik data tersebut dapat dipahami dan berguna untuk memecahkan masalah, terlebih untuk memecahkan masalah pada penelitian ini, berikut beberapa cara menganalisis data untuk metode kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data mentah yang dihasilkan catatan atau rekaman suatu lapangan.¹ Kegiatan reduksi data terjadi terus menerus sebagai bagian dari proyek atau pengumpulan data yang berorientasi pada kualitas. Langkah-langkah reduksi dilakukan selama

¹ Matthew B Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta:2007. Hlm.16.

pengumpulan data, yaitu buat ringkasan, kode, lacak tema, buat kluster, buat bagian, dan tulis catatan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menampilkan data, mengkategorikannya, mengarahkannya, membuang apa yang berlebihan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

2. Penyajian Data

Sejumlah kemungkinan argumen data dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam hal ini, informasi yang disajikan berupa cerita, gambar, jaringan, tautan tindakan, tabel, dll. Semua ini berfungsi untuk menyusun informasi sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

3. Analisis Data

Bagian ini adalah proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam kategori dan unit deskriptif dasar sehingga hipotesis yang diajukan oleh data dapat ditemukan. Proses ini lebih tentang memahami arti dari kumpulan data yang disajikan dan banyak lagi memahami dan menafsirkan isi informasi yang disajikan.

4. Verifikasi Data atau Menarik Kesimpulan.

Ketika reduksi data selesai dan data disajikan dalam format yang mudah dipahami yang membantu mengidentifikasi apa itu terjadi, langkah terakhir adalah meninjau data menarik kesimpulan dengan mencari arti dari

setiap gejala yang diterima pada tahun tersebut mengenali keteraturan dan pengaturan. kausalitas fenomena dan aliran preposisi. Konfigurasi yang utuh hanya Sebagian dari satu kegiatan penarikan kesimpulan. Adanya verifikasi pada kesimpulan selama penelitian dilakukan. Membuat kesimpulan hanyalah bagian dari aktivitas konfigurasi penuh, kesimpulan juga diperiksa selama penyelidikan. ³

1.9.6 Keabsahan Data

Pengolahan data kualitatif supaya dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya suatu uji keabsahan datanya. Perlunya uji keabsahan data agar hasil pengolahan data memiliki kredibilitas yang tinggi dan akuntabel. Setiap data diuji serta dianalisis untuk melihat kualitas data yang diambil itu valid dan mendapatkan hasil yang baik. (Dr. Umar Sidiq, 2019)

Triangulasi sumber data dalam penelitian kualitatif adalah metode yang menggabungkan berbagai pendekatan dan sumber data untuk memverifikasi keakuratan dan keabsahan informasi yang dikumpulkan.. Dengan melakukan triangulasi sumber data, peneliti menggunakan berbagai metode dan waktu untuk mengevaluasi informasi dari berbagai sumber yang

Matthew B Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta:2007. Hlm.16.³
Ibid., Hlm. 19.

berbeda, sehingga hanya data yang terpercaya yang menjadi dasar untuk membuat kesimpulan dalam penelitian. (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, 2010)